

Peran Intelijen Dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Pankrasius Wahu Nudan¹ Pujo Widodo² Mochammad Afifuddin³

Peperangan Asimetris, Universitas Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3}

Email: pankwahunudan@gmail.com¹ pujowidodo78@gmail.com²

Abstrak

Intelijen negara merupakan lini terdepan dalam diskursus keamanan nasional. Salah satu ancaman utama terhadap keamanan nasional dewasa ini adalah ancaman terorisme. Intelijen sebagai sebuah informasi, proses, misi dan organisasi sangat penting dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Penulis mencoba menjawab pertanyaan bagaimana peran Intelijen dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *Pertama*, Intelijen sebagai sebuah informasi harus memberikan informasi intelijen yang akurat berkaitan dengan terorisme karena hal tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan. *Kedua*, Intelijen sebagai sebuah proses harus melalui tahap *intelligence cycle* yang tepat. *Ketiga*, Misi intelijen dan kontraintelijen harus dilakukan secara profesional baik dari sisi Sumber Daya Manusia maupun peralatan yang digunakan, dengan mengikuti perkembangan *Revolution in Intelligence Affairs*. *Keempat*, Organisasi intelijen yang ada harus mampu meningkatkan koordinasi dan kerja sama agar penanggulangan terorisme dapat dilaksanakan secara optimal.

Kata Kunci: Intelijen, Terorisme, Keamanan Nasional

Abstract

National intelligence is at the forefront of the national security discourse. One of the main threats to national security today is the threat of terrorism. Intelligence as information, process, mission, and organization is very important in the effort to combat terrorism in Indonesia. The author attempts to answer the question of how intelligence plays a role in combating terrorism in Indonesia. The research approach used is a qualitative approach using secondary data sources. The results of the study show that; First, intelligence as information must provide accurate intelligence information related to terrorism because this will be one of the main considerations in policy making. Second, intelligence as a process must go through the appropriate intelligence cycle. Third, intelligence and counterintelligence missions must be carried out professionally in terms of both human resources and equipment used, following the development of the Revolution in Intelligence Affairs. Fourth, existing intelligence organizations must be able to improve coordination and cooperation in order to implement terrorism prevention optimally.

Keywords: Intelligence, Terrorism, National Security



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu fungsi utama dalam suatu sistem keamanan nasional adalah fungsi intelijen. Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara pada Pasal 3 menyebutkan bahwa hakikat Intelijen Negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional. Intelijen sangat berpengaruh dalam semua aspek keamanan nasional, termasuk dalam proses pengambilan kebijakan negara. Intelijen yang kuat dengan produk intelijen yang dapat dipercaya akan menuntun dengan baik dan benar dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pengguna (*user*). Sebaliknya, intelijen yang lemah akan berdampak buruk dalam pengambilan keputusan/kebijakan yang tentunya akan berimbas pula terhadap masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Ancaman terhadap keamanan nasional suatu negara saat ini semakin kompleks, tidak hanya dalam bentuk ancaman konvensional berupa serangan militer dari negara lain tetapi juga ancaman nonmiliter yang tidak kalah bahayanya dibanding dengan

ancaman militer dan seringkali berasal dari aktor nonnegara. Jenderal David Petraeus dan Andrew Roberts dalam bukunya *"Conflict, The Evolution of Warfare from 1945 to Ukraine"* (2023) menyatakan bahwa: *"We cannot forget that other forms of conflict persist in addition to conventional warfare. These include terrorism, insurgency (based on ideological, religious or criminal motivations), cyber warfare, guerrilla actions, major criminal activities (such as those in Mexico) and, increasingly, information warfare. It needs to be recognized that while major conventional warfare will hopefully be infrequent at most, small wars will continue to be fought and will often continue to require western involvement in some fashion."*

Dari pernyataan tersebut tampak bahwa salah satu isu penting berkaitan dengan ancaman terhadap keamanan nasional adalah isu tentang terorisme yang masih akan menjadi perhatian negara-negara di dunia, khususnya negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Bahkan bukan tidak mungkin ancaman-ancaman tersebut yang terjadi di suatu negara akan menimbulkan campur tangan negara besar untuk mengatasinya atau menahannya agar tidak meluas ke wilayah/negara lain. Perburuan terhadap tokoh Al Qaida, Osama bin Laden oleh AS yang dianggap bertanggung jawab terhadap serangan 11 September 2001 adalah salah satu contoh bagaimana sumber daya yang begitu besar digunakan untuk menumpas kelompok yang dianggap sebagai teroris internasional. Ancaman terorisme tidak hanya terjadi pada negara-negara besar tetapi juga terus berkembang ke negara-negara lain termasuk ke Indonesia. Sejumlah rentetan peristiwa pengeboman pasca peristiwa 11 September 2001 juga banyak terjadi di Indonesia, mulai dari Bom Bali I dan II, Bom Kuningan Jakarta, Bom Sarinah dan sejumlah serangan teroris lainnya di sejumlah kota di Indonesia. Saat ini dapat dikatakan bahwa serangan teroris di Indonesia kian menurun dan perburuan terhadap kelompok teroris terus dilakukan oleh aparat keamanan di berbagai daerah.

Meskipun serangan teroris di Indonesia saat ini tampak menurun, namun tidak berarti bahwa ancaman tersebut sudah tidak ada lagi. Pihak aparat keamanan dalam beberapa kesempatan terakhir juga telah berhasil menangkap kelompok teroris di sejumlah daerah. Dapat dikatakan bahwa ancaman terorisme saat ini bersifat laten, sehingga apabila aparat kemanan dan masyarakat tidak waspada, maka bukan tidak mungkin suatu saat nanti akan terjadi serangan teroris yang lebih besar dan berbahaya. Terlebih kondisi geopolitik global dan keamanan internasional saat ini juga sedang tidak kondusif mengingat banyaknya konflik yang terjadi di berbagai negara, mulai dari perang Rusia vs Ukraina hingga konflik Hamas vs Israel yang tentu saja dampak psikologi dan politiknya dapat berimbas pada sektor keamanan di negara lain, dalam hal ini yaitu tumbuh dan berkembangnya paham radikalisme yang dapat berujung pada tindakan teror. Radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dibidang politik atau paham/aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Radikalisme menjadi masalah karena radikalisme mempunyai sifat *"in tolerance"*, memaksakan kehendak, memonopoli ruang kesadaran bertentangan dengan realitas plural, sehingga konsepsi dan gerakannya selalu menebarkan konflik dan cenderung merupakan *"political crimes"* dalam bentuk *"crimes against democratic government"*. Dengan berkembangnya radikalisme pada masyarakat yang sudah memiliki tatanan kehidupan bersama akan dapat menimbulkan disintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Merujuk pada berbagai peristiwa yang terjadi sebelumnya di Indonesia, dapat diperoleh suatu hipotesis bahwa gerakan radikalisme di Indonesia banyak didominasi oleh radikalisme keagamaan yang ingin mengubah tatanan ketatanegaraan yang sudah ada dengan cara kekerasan, dengan sumbu pemicu adalah masalah kemiskinan, pengangguran dan kebodohan (Muladi: 2007).

Dalam konteks tersebut, maka peran intelijen sangat penting artinya guna mendeteksi secara dini adanya potensi serangan teroris di Indonesia. Pergerakan teroris yang tersembunyi

dan mahir dalam memanfaatkan teknologi tentunya menuntut kemampuan intelijen yang profesional dan canggih pula. Itu artinya sumber daya intelijen harus mempunyai kualifikasi dan keterampilan yang mumpuni ditunjang dengan peralatan yang memadai. Bagaimana sesungguhnya peran intelijen itu dilakukan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia menjadi sangat penting untuk ditelaah lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini menjadi sebuah metode ilmiah yang umum digunakan dan dilaksanakan oleh peneliti dalam bidang ilmu sosial. Penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Mania & Saat, 2020). Penelitian Kualitatif dilaksanakan pada kondisi alamiah secara langsung kepada sumber data dan peneliti berposisi sebagai instrumen kunci (Abubakar, 2021). Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan (Nugrahani, 2014). Berkenaan dengan sumber data, penulis menggunakan sumber data dengan pengumpulan data sekunder. Menurut Sugiyono (2016) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh bukan dari tangan pertama tetapi dari kedua, ketiga atau seterusnya. Beberapa peneliti mengutip dokumen seperti literatur atau teks akademis, majalah, surat kabar, brosur, dan lainnya sebagai data sekunder. Karena dokumen biasanya ditulis oleh pihak ketiga, seperti jurnalis atau penulis skenario yang bukan informan penelitian, data yang digunakan dalam dokumen tentu saja bukan tangan pertama (Syafnidawaty, 8 November 2020, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Intelijen Negara

Hampir seluruh literatur akademik mengenai intelijen menunjukkan satu kata tentang intelijen yakni informasi (Wibisono & Idris dalam Widjajanto, 2006). Informasi itu berkaitan dengan suatu isu yang sangat penting bagi pengambilan kebijakan strategis suatu negara atau institusi tertentu. Intelijen bukan sekedar informasi saja, melainkan produk dari suatu proses analitis yang mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, dan mengintegrasikan informasi-informasi yang relevan menjadi paket, dan memproduksi suatu kesimpulan atau pra-kiraan mengenai dinamika keamanan nasional dengan menggunakan metode pemecahan ilmiah (Bhakti, 2005). Informasi intelijen yang telah dikumpulkan, dikelola dan dianalisis kemudian diserahkan kepada pembuat kebijakan, melalui cara-cara yang bersifat rahasia. Hal ini dikarenakan informasi intelijen sangat melekat dengan masalah kekuatan militer, kemampuan pertahanan pihak lawan, kemajuan teknologi suatu negara, termasuk kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Pendapat yang dianggap sebagai teori intelijen dasar pertama adalah apa yang disampaikan oleh Sun Tzu, seorang ahli strategi dan perang dari Cina. Sebagaimana dikutip oleh Y. Wahyu Saronto (2004) Sun Tzu meletakkan dasar-dasar ilmu intelijen dalam falsafah perang di Cina kala itu, antara lain: *"Siapa yang memahami diri sendiri dan diri lawan secara mendalam, berada di jalan kemenangan pada semua pertempuran. Kenali musuh anda, kenali diri anda dan kemenangan anda tidak terancam. Kenali lapangan, kenali cuaca dan kemenangan anda akan lengkap."* Dari teori Sun Tzu tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila ingin memenangkan peperangan diperlukan kemampuan

untuk mengenal diri sendiri, mengenal lawan dan mengenal lingkungan. Teori dasar ini terus berkembang, yakni bagaimana upaya-upaya untuk mendapatkan informasi tentang diri sendiri, tentang lawan, tentang lingkungan. Kemudian bagaimana menganalisis informasi tersebut, sehingga dapat diketahui dengan pasti berbagai resiko, rencana lawan dan kemungkinan adanya hambatan-hambatan yang bersifat nonteknis (Saronto: 2004). Ada satu ciri khas yang melekat pada intelijen, yaitu sesuatu yang menjalankan kegiatan terselubung dalam tujuan untuk membantu pemerintah dalam melindungi warga negara dalam tujuan melaksanakan keamanan negara (Garnasih: 2008).

Loch K. Johnson dalam *The Oxford Handbook of National Security Intelligence* (2010) menjelaskan bahwa: *The main purpose of intelligence is to provide information to policy makers that may help illuminate their decision options. A leading intelligence official has suggested that the goal is one of "eliminating or reducing uncertainty for government decision makers. The assumption is that good -that is, accurate, comprehensive, and timely- information will lead to more effective choices made by government officials. Of course, policy makers receive information from a variety of sources, not just the nation's secret agencies.* Lebih lanjut Johnson (2010) menjelaskan bahwa makna intelijen dapat meliputi empat hal, yakni intelijen sebagai suatu informasi, proses, misi dan organisasi. *In this vei, when people speak of "intelligence" they are usually referring to information -tangible data about personalities and events around the globe. This information is communicated by intelligence officers to policy makers in the form of oral briefings, memoranda, and more formal reports, eather short or long, all focused on bringing a leader up-to-date on current events or investing the policy makers with a more in-depth comprehension of a topic based on exhaustive research. National Security intelligence can refer to more than an information product, though. It can mean a process as well. The process of collecting information, along with its analysis and dissemination to policy makers, is often known as the "intelligence cycle". Moreover, intelligence may be thought of as a set of missions carried out by a nation's secret agencies. Finally, intelligence may refer to a cluster of people and organizations that carry out the missions of collections-and analysis, counterintelligence, and covert action.*

Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara pada Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa *Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.* Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 5 (UU No.17 Tahun 2011) bahwa *tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.* Sementara itu menurut Andi Widjajanto, Cornelis Lay dan Makmur Keliat (2006) dijelaskan bahwa dalam suatu negara, ada tiga institusi utama yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi keamanan negara, yaitu melalui pembentukan tentara, polisi dan intelijen. Kebutuhan untuk pembentukan intelijen negara pada dasarnya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ancaman-ancaman berupa pendadakan-pendadakan strategis (*strategic surprises*) dengan cara mengumpulkan dan menganalisis informasi serta memberikannya kepada pembuat kebijakan. Karena tujuannya adalah penghindaran terjadinya pendadakan-pendadakan strategis itu intelijen dapat memiliki ruang gerak yang lebih lentur dibandingkan dengan tentara dan polisi.

Berkaitan dengan teori dasar intelijen, menurut Wahyu Saronto (2004), dewasa ini teori dasar intelijen sudah bersifat universal, sehingga dimanapun di seluruh dunia, teori dasar intelijen berkisar pada teori penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Kalau ada

perbedaan, maka itu terletak pada penerapan dan pengembangannya yang disesuaikan dengan kebutuhan si pengguna dan sistem yang dianut oleh si pengguna (pemerintah, negara, perusahaan dan sebagainya). Roda Perputaran Intelijen (RPI) atau juga disebut daur intelijen atau *the intelligence cycle* adalah suatu proses pengembangan informasi dasar menjadi produk intelijen bagi pengguna (*user*) untuk pengambilan keputusan atau tindakan. Empat tahap kegiatan dalam RPI adalah; Pertama, perencanaan dan pengarahan (*planning and direction*), yaitu suatu manajemen dalam rangka mengidentifikasi data hingga menyajikan suatu produk intelijen kepada pengguna (*user*). Kedua, pengumpulan (*collection*), yaitu pengumpulan informasi dasar untuk diolah menjadi produk intelijen. Ketiga, proses pengolahan (*processing*), yaitu menganalisa dan mengolah informasi dasar menjadi laporan intelijen. Keempat, penggunaan dan distribusi (*distribution*), yaitu penggunaan/distribusi kepada pengguna (*user*) dan pihak lain yang membutuhkan (Saronto: 2004).

Terorisme

Terorisme merupakan perhatian utama dan secara drastis telah muncul sebagai permasalahan utama dan dominan bagi hampir seluruh negara di dunia, terutama AS. Pada tahun 1970-an dan 1980-an hampir semua intelijen di dunia memarginalkan persoalan terorisme, sebaliknya masa itu semuanya berfokus pada diskusi, bagaimana pulket dan analisis tentang komunisme. Pengeboman pertama *World Trade Center* pada tahun 1993 merupakan suatu tanda tumbuh berkembangnya bentuk baru dari terorisme, yaitu suatu teror yang tidak disponsori oleh suatu negara tertentu, tidak diarahkan kepada suatu tujuan akhir dari politik tertentu, tetapi tujuannya hanya bagaimana membunuh warga negara AS sebanyak mungkin. Pada akhir tahun 1990-an komunitas intelijen tidak hanya mengenali permasalahan baru ini, tetapi juga telah mengidentifikasi Osama bin Laden sebagai penyandang dana dan sekaligus pengorganisasi sebuah jaringan teroris internasional. Setelah mengebom kedutaan AS di Kenya dan Tanzania pada tahun 1998 ditambah lagi dengan terjadinya serangan 11 September 2001, menjadikan teroris ini sebagai prioritas paling tinggi bagi seluruh komunitas intelijen AS (Supriyatno: 2014). Osama bin Laden akhirnya dapat terbunuh dalam operasi Pasukan Khusus AS pada tanggal 2 Mei 2011 di Abbottabad, Pakistan.

Terorisme sebagai suatu fenomena dan gejala yang terus bergerak, selalu saja sulit diberikan definisi yang bersifat universal dan komprehensif. Definisi yang muncul antara lain memberikan pemahaman bahwa terorisme berasal dari kata teroris (pelaku) dan berkaitan dengan aksi. Terorisme (aksi) berasal dari kata latin "*terrere*" yang kurang lebih berarti yang membuat gemetar atau menggetarkan. Kata "teror" bisa juga diartikan sebagai sesuatu hal yang menimbulkan kengerian. Dalam suatu pengertian yang lain dikatakan bahwa *terrorism*, dapat diartikan sebagai penggunaan kekerasan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan politik atau untuk memaksa suatu pemerintahan berbuat sesuatu (Garnasih: 2008). Beberapa pengertian terorisme dikemukakan pula oleh Hendropriyono dalam bukunya *Terorisme, Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam* (2009). Teror mengandung arti penggunaan kekerasan untuk menciptakan atau mengkondisikan sebuah iklim ketakutan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas, daripada hanya pada jatuhnya korban kekerasan. Publikasi media massa adalah salah satu tujuan dari aksi kekerasan dari suatu aksi teror, sehingga pelaku merasa sukses jika kekerasan dalam terorisme serta akibatnya dipublikasikan secara luas di mass media. Menurut *US Department of Defence*, terorisme yaitu "Penggunaan kekerasan yang diperhitungkan dapat memaksa atau menakut nakuti pemerintah-pemerintah atau berbagai masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan yang biasanya bersifat politik, agama atau ideologi" (Hendroriyono, 2009). Dalam konteks terorisme global, menurut Hendropriyono (2009), akar terorisme global pada era ini adalah ideologi universal, bukan agama yang secara sangat sinis kerap dikaitkan

dengan ideologi itu. Ideologi yang mendorong benturan, konflik, dan mempertajam fragmentasi budaya secara terus menerus, telah menumbuhkan fundamentalisme. Fundamentalisme merupakan fenomena global yang dapat ditemui di semua agama-agama besar di dunia. Ketika perspektif politik dunia dibatasi pada relasi Islam-Barat, maka perspektif itu bagi sebagian orang yang berbicara tentang fundamentalisme berarti melakukan tuduhan. Fundamentalisme tidak menunjukkan keyakinan-keyakinan agama, tetapi lebih merupakan pandangan dunia sosio-politik, yakni masalah yang menyangkut watak negara, masyarakat, dan politik dunia.

Peran Intelijen dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia

Dalam perang global melawan terorisme pelajaran penting yang dapat ditarik adalah intelijen telah terbukti sebagai senjata paling efektif untuk melawan terorisme dan tidak ada yang dapat menggantikan fungsi badan intelijen (United States Congress Committee on Foreign Relations, 2000). Dalam sejarah bangsa Indonesia misalnya, proses terbentuknya NKRI tidak terlepas dari kerja-kerja yang dilakukan intelijen. Hasil kerja-kerja intelijen tersebut tentu memberikan kontribusi bagi pembentukan negara bangsa maupun dalam menghadapi berbagai tantangan atau ancaman yang hadir. Menurut Lowhental (2009) dua alasan utama pentingnya keberadaan intelijen bagi suatu negara. Pertama, untuk menghindari terjadinya *strategic surprise* (dadakan strategis). Setiap dinas intelijen dituntut mampu mendeteksi segala ancaman, kekuatan, peristiwa, dan perkembangan yang berpotensi membahayakan eksistensi bangsa dan negara. Ketidaksiapan suatu negara menghadapi ancaman dan situasi yang berkembang akan mengakibatkan kerugian atau ketidakamanan. Sebagai contoh, pembentukan Badan Intelijen negara, Baintelkam, Bais TNI, atau badan intelijen lainnya yang sejenis ditujukan untuk menghindari terjadinya ancaman terhadap keamanan yang dapat menghancurkan NKRI.

Kedua, untuk mendukung proses kebijakan. Para pembuat kebijakan secara konstan membutuhkan laporan yang tepat dan akurat mengenai latar belakang, konteks, informasi, peringatan, penilaian risiko, keuntungan, dan perkiraan hasil yang akan terjadi. Kebutuhan inilah yang kemudian dipenuhi melalui keberadaan intelijen. Intelijen dituntut senantiasa profesional dan objektif dalam memberikan laporan, tidak bias mendukung atau mendorong pada suatu kebijakan, pilihan, maupun hasil tertentu. Ketiga, untuk menjaga kerahasiaan informasi, kebutuhan, maupun metode. Pada saat pemerintahan suatu negara menyimpan informasi penting yang dirahasiakan, cara mendapatkan informasi tersebut pun bersifat rahasia. Hal ini merupakan salah satu alasan keberadaan dinas intelijen (Lowhental:2009). Merujuk pada penjelasan Loch K. Johnson (2010) sebagaimana disebutkan sebelumnya, makna intelijen dapat meliputi empat hal, yakni intelijen sebagai suatu informasi, proses, misi dan organisasi. Oleh karena itu, peran intelijen dalam upaya penanggulangan terorisme khususnya di Indonesia dapat dijelaskan melalui sudut pandang empat hal tersebut. Intelijen sebagai sebuah informasi, intelijen sebagai suatu proses, intelijen sebagai suatu kegiatan atau misi dan intelijen sebagai suatu organisasi.

Sebagai suatu informasi, maka ancaman terorisme di Indonesia harus dipahami hingga ke akar-akarnya. Informasi berkaitan dengan ancaman terorisme tersebut harus mampu menjawab pertanyaan "siapa" (*who*), "apa" (*what*), "kapan" (*when*), "dimana" (*where*), "mengapa" (*why*), dan "bagaimana" (*how*). Keseluruhan jawaban tersebut merupakan informasi dasar intelijen yang akan diolah lebih lanjut. "Siapa" (*who*) merujuk pada aktor-aktor teroris atau yang diduga berafiliasi dengan teroris sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dari intelijen dan pihak keamanan. Terorisme dewasa ini tidak hanya beroperasi secara lokal di sebuah negara, tetapi seringkali juga berafiliasi dengan terorisme internasional,

sehingga secara geopolitik dan geostrategi perlu ditelusuri pula jaringan terorisme yang ada di Indonesia dalam kaitannya dengan terorisme global di sejumlah negara lain, khususnya yang masih mengalami konflik. Bukan tidak mungkin pula aktor teroris bersifat individual sehingga kadangkala lebih sulit untuk diidentifikasi dalam masyarakat dan oleh karena itu diperlukan adanya dukungan kesadaran masyarakat dalam hal keamanan lingkungan masing-masing. "Apa" (*what*) merujuk pada tindakan atau langkah-langkah apa yang hendak dilakukan oleh kelompok teroris, sehingga perlu untuk dicegah atau diwaspadai. Langkah-langkah yang dilakukan oleh teroris tidak hanya dalam arti tindakan teror itu sendiri, tetapi juga bagaimana proses rekrutmen anggota teroris serta pembinaan dan pelatihannya. "Kapan" (*when*) berkaitan dengan waktu, kapan aksi terorisme itu diprediksi akan muncul, sehingga perlu dilakukan langkah pencegahan sebelum aksi teror dilakukan. Aksi teror seringkali juga mencari momentum yang tepat, berkaitan dengan peringatan hari-hari besar tertentu yang menjadi perhatian publik, seperti hari-hari besar keagamaan, pergantian tahun dan lain-lain. Tentu saja ada momentum-momentum lain bergantung pada kondisi masing-masing wilayah atau negara. "Dimana" (*where*) berkaitan dengan lokus dari kegiatan terorisme itu sendiri. Baik dari sisi lokasi yang akan dijadikan target sasaran teroris, tetapi juga tempat dimana markas teroris tersebut beroperasi. Objek vital nasional, tempat-tempat ibadah maupun ruang publik yang menjadi pusat berkumpul masyarakat perlu mendapat perhatian khusus dari sisi pengamanan terhadap aksi terorisme. "Mengapa" (*why*) merujuk pada alasan-alasan mengapa aksi teror itu dilakukan, yang menjadi akar dari tindakan teroris itu sendiri. Hal ini penting untuk diketahui agar dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan berkembangnya terorisme. "Bagaimana" (*how*) berkaitan dengan cara atau tindakan teror seperti apa yang akan dilakukan. Tindakan ini seringkali berupa aksi fisik seperti pengeboman, pembunuhan atau aksi teror lainnya yang dapat menakuti masyarakat secara luas.

Semua informasi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut diolah dan analisa hingga menjadi suatu produk intelijen. Produk intelijen ini harus berusaha untuk menyajikan evaluasi komprehensif tentang suatu situasi, berdasarkan semua data yang tersedia, baik publik maupun rahasia yang tentu saja dapat bervariasi dari satu dinas intelijen ke dinas intelijen lainnya (Shulsky dan Schmitt, 2002). Produk intelijen inilah yang nantinya akan digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan. Ancaman terorisme sangatlah berbahaya karena menyangkut keselamatan manusia dan lebih dari itu menyangkut keselamatan bangsa dan negara. Oleh karena itu informasi intelijen haruslah cepat dan akurat agar kebijakan yang dibuat nantinya tidak salah sasaran atau menyimpang. Sebagai sebuah proses, Roda Perputaran Intelijen (*Intelligence cycle*) dalam mendeteksi ancaman terorisme harus dilakukan secara sempurna, dengan data dan informasi yang valid serta analisa yang komprehensif. Mulai dari perencanaan dan pengarahan, pengumpulan informasi dasar, proses pengolahan yaitu menganalisa dan mengolah informasi dasar menjadi laporan intelijen, serta penggunaan dan distribusi kepada pengguna (*user*) dan pihak lain yang membutuhkan harus dilakukan secara tepat. Proses intelijen yang tidak tepat akan mengakibatkan adanya salah kalkulasi atau perhitungan dan salah dalam mengambil tindakan di lapangan maupun oleh pengambil kebijakan di level atas.

Adapun intelijen sebagai sebuah misi dalam hal ini adalah bagaimana agar setiap operasi intelijen maupun kontraintelijen terhadap kelompok teroris dilakukan secara tepat sasaran dengan tetap mengurangi resiko keamanan insan intelijen itu sendiri. Komunitas intelijen harus mampu menyusup ke dalam sel-sel teroris sehingga deteksi dini yang dihasilkan berdasarkan pada sumber yang valid. Selain itu misi intelijen dan kontraintelijen juga harus memaksimalkan perangkat teknologi yang kian canggih. Hal ini selain penting dalam memperoleh informasi yang akurat juga untuk meminimalisir ancaman setiap anggota intelijen

yang bertugas. Operasi rahasia intelijen sekarang ini tidak selalu dilakukan di ruang fisik seperti penempatan agen di lapangan tetapi bisa juga dilakukan di ruang digital. Ada tiga operasi rahasia intelijen yang dilakukan di Indonesia misalnya operasi penyadapan, operasi patroli siber dan operasi cipta kondisi (Haripin:2022). Dalam era teknologi digital yang terus berkembang saat ini telah memunculkan juga apa yang disebut sebagai *Revolution in Intelligence Affairs*. Perangkat teknologi intelijen yang canggih termasuk penggunaan *artificial intelligence* (AI) seyogyanya dapat dimiliki oleh lembaga intelijen dalam upaya mendeteksi ancaman terorisme di Indonesia. Pada tahun 2000an, intelijen Indonesia sudah bisa melakukan penyadapan atas metadata telpon, seperti lokasi penelpon dan penerima telpon. Kemampuan ini kerap digunakan untuk melacak jaringan teroris di tanah air (Mengko dalam Haripin:2022). Selain penyadapan telepon, komunitas intelijen Indonesia juga diketahui mengembangkan kemampuan untuk melakukan penyadapan aktivitas internet suatu target dari handphone genggam atau komputernya. Hal itu tersingkap dari pembelian peralatan surveilans ke Gamma TSE, perusahaan keamanan Inggris, tahun 2013 silam. Peralatan surveilans yang dimaksud adalah FinFisher, yakni alat yang memiliki kemampuan menyadap kegiatan seseorang melalui telepon seluler dan komputer mereka, semua data tersimpan atau data internet yang diakses ponsel/komputer tersebut dapat dipantau (Mengko dalam Haripin:2022). Selain itu, di era keterbukaan informasi dan komunikasi global saat ini, komunitas intelijen juga dapat memanfaatkan *open source intelligence* (OSINT) dalam mendeteksi atau memburu kelompok-kelompok teroris yang ada di Indonesia.

Berikutnya adalah intelijen sebagai sebuah organisasi. Badan Intelijen Negara (BIN) dan juga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah diberikan kewenangan yang cukup besar dalam upaya menanggulangi ancaman terorisme di Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan maupun penindakan terhadap aksi terorisme hendaknya dapat lebih ditingkatkan lagi melalui kerja sama yang baik antar lembaga intelijen lainnya yang ada, termasuk intelijen Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Ego sektoral hendaknya dapat diminimalisir agar Roda Perputaran Intelijen dapat dilakukan secara sempurna yang melibatkan seluruh komunitas intelijen secara terpadu. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Intelijen kiranya juga perlu ditingkatkan termasuk melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga intelijen di luar negeri. Selain bermanfaat dalam berbagi informasi intelijen, diharapkan melalui kerja sama tersebut juga dapat memberikan pengalaman dan sudut pandang yang lebih baik bagi para insan intelijen dalam menjalankan tugasnya. Peningkatan kualitas SDM ini juga harus diimbangi dengan penyediaan peralatan intelijen yang mumpuni termasuk dari sisi teknologi, agar operasi intelijen yang dilakukan dapat lebih optimal dan tidak mampu dikalahkan atau dideteksi oleh kelompok-kelompok teroris.

KESIMPULAN

Intelijen memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. Bahkan intelijen merupakan lini terdepan dalam upaya meningkatkan keamanan nasional secara umum dari suatu negara. Terorisme sendiri saat ini masih merupakan ancaman yang nyata tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi banyak negara di dunia. Oleh karena itu Lembaga-lembaga intelijen yang ada harus mampu berkolaborasi dengan baik dalam mendeteksi ancaman terorisme yang akan muncul dan mengancam keselamatan warga negara. Fungsi intelijen baik sebagai sebuah informasi, proses, misi dan organisasi khususnya dalam menanggulangi ancaman terorisme hendaknya dapat ditingkatkan kembali melalui kerja sama yang baik antar lembaga intelijen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dinamika politik global maupun regional dalaam era globalisasi saat ini dapat mempengaruhi kondisi keamanan nasional. Oleh karena itu perhatian komunitas intelijen

hendaknya juga harus memperhatikan perkembangan geopolitik global yang akhir-akhir ini kian memanas di sejumlah Kawasan. Paradigma intelijen dalam menanggulangi ancaman terorisme tidak hanya inward looking tetapi juga harus semakin outward looking. Selain itu, peningkatan kualitas SDM insan intelijen juga harus terus ditingkatkan agar tidak terjebak pada rutinitas yang ada, termasuk dalam menganalisa potensi ancaman terorisme karena bukan tidak mungkin di era modern sekarang ini pola ancaman terorisme juga terus berubah dengan pola baru, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, komunitas intelijen juga harus didukung dengan peralatan intelijen yang canggih guna mengimbangi potensi ancaman yang muncul dari kelompok teroris, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada akan memunculkan potensi ancaman keamanan yang baru pula yang tentunya dapat digunakan oleh kelompok teroris.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Kusnanto. 2005. Geopolitik, Pengendalian Ruang Laga dan Strategi Pertahanan Indonesia. Dalam Bantarto Bandoro (ed.). Perspektif baru Keamanan nasional. Jakarta: CSIS.
- Anggoro, Kusnanto. 2005. Paradigma Keamanan Nasional dan Pertahanan Negara di Negara Demokrasi. Dalam Andi Widjajanto dkk. Dinamika Reformasi Sektor Keamanan. Jakarta: Imparsial.
- Araf, Al. 2005. Dilema Dalam Menata Ulang Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara. Dalam Andi Widjajanto dkk. Dinamika Reformasi Sektor Keamanan. Jakarta: Imparsial.
- Buzan, Bary, Ole Waever & Jaap de Wilde. 1998. Security, A New Framework for Analysis, Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc.
- Coker, Christopher. 2015. Future War. Cmbridge: Polity Press.
- Garnasih, Yenti. 2008. Peranan Badan Intelijen Negara dalam Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme di Indonesia. Dalam Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen Volume IV, No. 21. Jakarta: Centre for the Study of Intelligence and Counterintelligence.
- Haripin, Muhamad (Ed). 2022. "Intelijen dan Keamanan Nasional di Indonesia Pasca Orde Baru". Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hendropriyono, A.M. 2009. Terorisme, Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Johnson, Loch K. (Editor). 2010. The Oxford Handbook of National Security Intelligence. New York: Oxford University Press.
- Lowhental, Mark. M. 2009. Intelligence: From Secret to Policy (Washington D.C: CQ Press.
- Manggala, Pandu Utama. 2008. Mencari Bentuk Strategi Pertahanan dan Keamanan Nasional: Tinjauan Keamanan Nasional dan Analisa Ancaman. Dalam Jurnal Intelijen dan Kontra Intelijen Volume IV, No.21, Januari-Februari 2008. Jakarta: Centre for The Study of Intelligence and Counterintelligence.
- Muladi. 2007. Upaya Pencegahan Radikalisme Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional. Dalam Jurnal Intelijen & Kontra Intelijen Volume III, No.17. Jakarta: Centre for the Study of Intelligence and Counterintelligence.
- Nainggolan, Poltak Partogi. 2020. Masalah Keamanan Abad Ke-21. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Najzer, Brin. 2020. The Hybrid Age (International Security in the Era of Hybrid Warfare). London: I.B. TAURIS.
- Nugrahani, Farida. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Solo: Cakra Books.
- Nugroho, Riant. 2013. National Security Policy, Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Petraeus, David & Andrew Roberts. 2023. Conflict, The Evolution of Warfare from 1945 to Ukraine. New York: Harper Collins Publishers.

- Rifa'i Abubakar. 2021. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Shulsky, Abram N. dan Gary J. Schmith. 2002. Silent Warfare: Understanding the World of Intelligence. Dulles, Virginia: Brassey's Inc.
- Sudrajat. 2001. Wawasan Hankamneg: Misi dan Kewenangan TNI-Polri. Dalam Indria Samego (ed.). Sistem Pertahanan Keamanan Negara: Analisis Potensi dan Problem. Jakarta: The Habibie Centre.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman Saat & Sitti Mania. 2020. Pengantar Metodologi Penelitian (Panduan Bagi Peneliti Pemula). Gowa: Pusaka Almada.
- Supriyatno, Makmur. 2014. Tentang Ilmu Pertahanan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suryohadioprojo, Sayidiman. 1981. Masalah Pertahanan Negara, Suatu Pengantar Dalam Ilmu Perang. Jakarta: PT. Intermasa.
- Suryohadioprojo, Sayidiman. 2005. Si Vis Pacem Para Bellum, Membangun Pertahanan Negara Yang Modern dan Efektif. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syafnidawaty, 8 November 2020, Data sekunder. <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>
- Widjajanto, Andi, Cornelis Lay, Makmur Keliat. 2006. Intelijen: Velox et Exactus. Jakarta: Pacivis; Center for Global Civil Society Studies dan Kemitraan.
- Widjajanto, Andi. 2005. Rekonstruksi Gelar Pertahanan Indonesia. Dalam Andi Widjajanto dkk. Dinamika Reformasi Sektor Keamanan. Jakarta: Imparsial.
- Widjojo, Agus. 2001. Wawasan Masa Depan Tentang Sistem Pertahanan Keamanan Negara, dalam Indria Samego (ed.). Sistem Pertahanan Keamanan Negara: Analisis Potensi dan Problem. Jakarta: The Habibie Centre.
- Williams, Paul D. 2008. Security Studies, An Introduction. New York: Routledge.
- Y. Saronto, Wahyu dkk. 2004. Intelijen (Teori, Aplikasi, dan Modernisasi). Jakarta: PT Ekalaya Saputra.